



PENGADILAN TINGGI GORONTALO

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO TAHUNAN T.A 2023 (*UNAUDITED*) 005.01.3100.664539





LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(Unaudited)

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
BAGIAN ANGGARAN 005.01.3100.664539

Gorontalo, Februari 2024

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

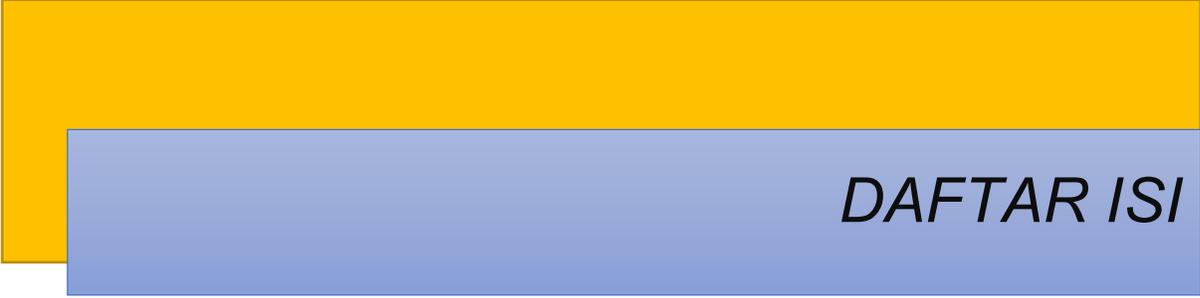
Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gorontalo, Februari 2024
Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo,

Denny A Y Walukow, S.E
NIP. 197.04113.200502.1.001





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	41
VI. Lampiran dan Daftar	

(Lampiran berupa cetakan dari aplikasi SAIBA dan BMN dan lampiran lainya yang mendukung)

seperti

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Realisasi Belanja
3. Laporan Pengembalian Belanja
4. Laporan Realisasi Pendapatan

5. Laporan Pengembalian Pendapatan
6. Neraca Percobaan
7. Laporan Operasional
8. Laporan Perubahan Ekuitas
9. Neraca
10. Berita Acara Opname Fisik Persediaan
11. BAR Internal
12. Surat Hasil Rekonsiliasi
13. Dokumen Lainnya



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023	3
Tabel Neraca Per 31 Desember 2023	4
Tabel Laporan Operasional Per 31 Desember 2023	5
Tabel Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2023	6
Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang	13
Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	17
Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	19
Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember TA. 2023 dan Per 31 Desember 2022	20
Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA. 2023	20
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA. 2023 dan Per 31 Desember 2022	21
Tabel Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember TA. 2023 dan Per 31 Desember 2022	22
Tabel Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember TA. 2023 dan Per 31 Desember 2022	23
Tabel Perbandingan Belanja Modal Per 31 Desember TA.2022 dan Per 31 Desember 2022	23
Tabel Rincian Kas Lainnya Setara Kas Per 31 Desember 2023	24
Tabel Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023	24
Tabel Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022	26
Tabel Mutasi Nilai Tanah Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022	27
Tabel Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2023	27
Tabel Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022	27
Tabel Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022	28
Tabel Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022	29
Tabel Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022	29
Tabel Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022	29
Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember	39
Tabel Mutasi Transaksi Terhadap Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023	30

Tabel Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023	30
Tabel Mutasi Aset Lain-Lain	31
Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	31
Tabel Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember TA. 2023	32
Tabel Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember TA. 2023	33
Tabel Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember TA. 2023	33
Tabel Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember TA. 2023	34
Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember TA. 2023	34
Tabel Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember TA. 2023	35
Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember TA. 2023	36
Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember TA. 2023	36
Tabel Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember TA. 2023	37
Tabel Rincian Transaksi Antar Entitas TA. 2022	39
Tabel Rincian Transfer Masuk/Keluar	40

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Jalan Tinaloga.No.2 Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo
Website ; www.pt-gorontalo.go.id Email : info@pt-gorontalo.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Wilayah Pengadilan Tinggi Gorontalo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gorontalo, Februari 2024
Sekretaris

Benny A. Y. Walukow, S.E
NIP. 197403182005021001

RINGKASAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahunan 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp26.879.075 atau mencapai 147.19 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp18.261.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp12.117.708.813 atau mencapai 97.70 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp12.403.198.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023 .

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 21.184.885.846; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp26.676.032; Piutang Jangka Panjang (*netto*) sebesar Rp0; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp21.158.209.814; dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp0.

Nilai kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp25.369.867 dan Rp21.159.515.979.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22.204.075, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp12.696.440.035 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp12.674.235.960. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp2.450.250 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp12.671.785.710.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp21.564.833.908 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp12.671.785.710, kemudian ditambah dengan Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp158.269.293 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp12.108.198.488 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp21.159.515.979.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I.

*LAPORAN REALISASI
ANGGARAN*

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN TINGGI GORONTALO LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23		% thd Angg	31-Dec-22
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	18,261,000	26,879,075	147.19	23,016,754
JUMLAH PENDAPATAN		18,261,000	26,879,075	147.19	23,016,754
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	10,100,181,000	9,816,536,107	97.19	12,695,448,370
Belanja Barang	B.4	2,193,017,000	2,191,213,716	99.92	2,691,989,442
Belanja Modal	B.5	110,000,000	109,958,990	99.96	344,278,750
JUMLAH BELANJA		12,403,198,000	12,117,708,813	97.70	15,731,716,562

II.

NERACA

II. NERACA

PENGADILAN TINGGI GORONTALO NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	9,473,850	10,887,777
Persediaan	C.2	17,202,182	75,179,490
JUMLAH ASET LANCAR		26,676,032	86,067,267
ASET TETAP			
Tanah	C.3	7,602,649,000	7,602,649,000
Peralatan dan Mesin	C.4	5,285,284,031	5,155,475,041
Gedung dan Bangunan	C.5	15,399,408,200	14,922,950,200
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.6	-	476,458,000
Aset Tetap Lainnya	C.7	28,199,905	28,199,905
Akumulasi Penyusutan	C.8	(7,157,331,322)	(6,706,511,075)
JUMLAH ASET TETAP		21,158,209,814	21,479,221,071
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.9	29,985,000	29,985,000
Aset Lain-Lain	C.10	-	508,234,560
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.11	(29,985,000)	(535,994,810)
JUMLAH ASET LAINNYA		-	2,224,750
JUMLAH ASET		21,184,885,846	21,567,513,088
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.12	25,369,867	2,679,180
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		25,369,867	2,679,180
JUMLAH KEWAJIBAN		25,369,867	2,679,180
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	21,159,515,979	21,564,833,908
JUMLAH EKUITAS		21,159,515,979	21,564,833,908
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		21,184,885,846	21,567,513,088

III.

LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN TINGGI GORONTALO LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	22,204,075	23,016,754
JUMLAH PENDAPATAN		22,204,075	23,016,754
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	9,839,849,076	12,695,448,370
Beban Persediaan	D.3	114,769,502	49,938,472
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,287,463,619	1,700,743,051
Beban Pemeliharaan	D.5	509,229,915	612,740,938
Beban Perjalanan Dinas	D.6	338,519,633	387,358,650
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	606,608,290	642,705,805
JUMLAH BEBAN		12,696,440,035	16,088,935,286
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(12,674,235,960)	(16,065,918,532)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		4,675,000	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2,224,750	0
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2,450,250	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(12,671,785,710)	(16,065,918,532)
POS LUAR BIASA	D.9		
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO		(12,671,785,710)	(16,065,918,532)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN TINGGI GORONTALO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
EKUITAS AWAL	E.1	21,564,833,908	21,814,641,382
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(12,671,785,710)	(16,065,918,532)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.5	158,269,293	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.6	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	12,108,198,488	15,816,111,058
EKUITAS AKHIR	E.6	21,159,515,979	21,564,833,908

V.

*CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 471 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Pusat;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
 17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akruwal dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
 22. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
 23. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023 (*Unaudited*).

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Tinggi Gorontalo yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi yang ingin diwujudkan.

Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijaksanaan umum peradilan yang ada di Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagaimana diuraikan dalam *BluePrint* Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sebuah pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh, Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai visi yang sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI.

Visi Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat dirumuskan sebagai berikut :
“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Gorontalo Sebagai Peradilan Yang Agung”

Untuk mewujudkan dan mencapai Visi Pengadilan Tinggi Gorontalo maka ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Gorontalo;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Untuk mewujudkan Visi, Misi yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan aksesibilitas terhadap putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan;
5. Peningkatan kualitas pengawasan;
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam melakukan pengelolaan keuangan meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI mencakup seluruh pengelolaan keuangan negara pada satker yang masing-masing pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi

seperti modul penganggaran, modul komitmen, modul bendahara, modul aset tetap, modul persediaan, modul pembayaran, modul piutang dan modul GL dan pelaporan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi MA yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatandisajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bias diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi PMK Nomor 181/PMK.06/2016 sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga dan ATR yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan ATR yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian

Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber

sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
<i>Software</i>	4 Tahun
<i>Franchise</i>	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomo Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hingga saat ini satker Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan 11 (sebelas) kali revisi hingga akhir periode tahunan 2023 ini. Hal ini dapat dilihat dari rincian DIPA dibawah ini:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	18,261,000	18,261,000
Jumlah Pendapatan	18,261,000	18,261,000
Belanja		
Belanja Pegawai	14,080,181,000	10,100,181,000
Belanja Barang	2,382,711,000	2,193,017,000
Belanja Modal	0	110,000,000
Jumlah Belanja	16,462,892,000	12,403,198,000

Revisi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut pada jenis belanja, terutama pada belanja pegawai.

Realisasi
Pendapatan
Rp26.879.075

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.879.075 atau 147.19 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp18.261.000. Pendapatan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo terdiri dari Pendapatan Penjualan dan Pengelolaan BMN. Rincian realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real. Pendapatan
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	18,261,000	26,879,075	147.19
Jumlah	18,261,000	26,879,075	147.19

Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN per 31 Desember TA 2023 mengalami penurunan 3.53 persen dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat 1 unit rumah dinas yang sudah tidak ditempati pada tahun 2023. Sedangkan realisasi Pendapatan dari Penjualan BMN berupa Peralatan dan

Mesin mengalami kenaikan 100 persen dari tahun sebelumnya. Pendapatan dari Penjualan BMN tersebut merupakan penjualan atas Peralatan dan Mesin sejumlah 105 unit dalam kondisi Rusak Berat yang tertuang dalam Risalah Lelang KPKNL Gorontalo Nomor 146/77/2023 tanggal 04 Mei 2023 dan NTPN 9A0E33CIFAT95JJN.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER T.A. 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	22,204,075	23,016,754	-3.53
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4,675,000	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	0.00
Jumlah	26,879,075	23,016,754	16.78

Rumah dinas yang tersedia sebanyak 7 (tujuh) namun yang ditempati sebanyak 5 (lima) rumah dinas.

Realisasi Belanja
Negara
Rp12.117.708.813

B. 2 Belanja

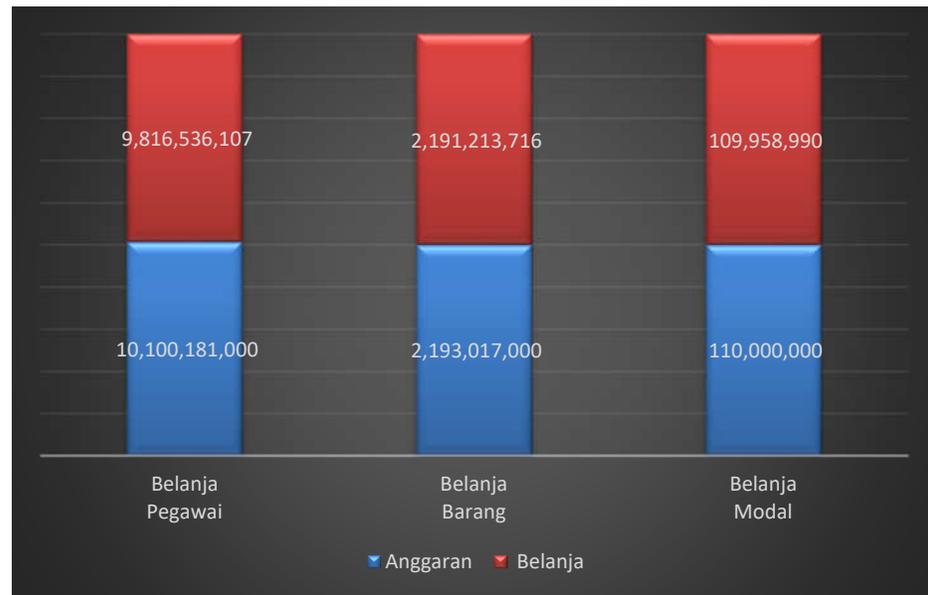
Akumulasi Realisasi Belanja instansi per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp12.117.708.940 dengan adanya pengembalian belanja sebesar Rp127 maka realisasi belanja *netto* Rp12.117.708.813 atau 97,7% dari anggaran belanja sebesar Rp12.403.198.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	10,100,181,000	9,816,536,234	97.19
Belanja Barang	2,193,017,000	2,191,213,716	99.92
Belanja Modal	110,000,000	109,958,990	99.96
Total Belanja Kotor	12,403,198,000	12,117,708,940	97.70
Pengembalian	-	(127)	-
Jumlah	12,403,198,000	12,117,708,813	97.70

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Belanja per 31 Desember TA 2022, total realisasi belanja per 31 Desember TA 2023 mengalami penurunan sebesar 22,97% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Realisasi belanja pegawai lebih rendah dari tahun sebelumnya karena dipengaruhi oleh jumlah pegawai yang mutasi keluar (pindah satuan kerja);
2. Realisasi belanja barang lebih rendah dari tahun sebelumnya dikarenakan belanja jasa berupa Belanja Langganan Daya Listrik menggunakan anggaran Eselon 1 (Badan Urusan Administrasi);
3. Pagu untuk belanja modal tahun anggaran 2023 lebih sedikit dibanding pada tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi realisasi belanja.

*Perbandingan Realisasi Belanja
per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	9,816,536,107	12,695,448,370	(22.68)
Belanja Barang	2,191,213,716	2,691,989,442	(18.60)
Belanja Modal	109,958,990	344,278,750	(68.06)
Jumlah	12,117,708,813	15,731,716,562	(22.97)

Belanja Pegawai
Rp9.816.536.107

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.816.536.107 dan Rp12.695.448.370.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023 turun sebesar 22,68% dari per 31 Desember TA 2022. Secara keseluruhan hal ini disebabkan antara lain oleh adanya mutasi keluar 7 (tujuh) orang Hakim dan 2 (dua) orang pegawai sehingga berpengaruh pada realisasi belanja pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	8,561,557,234	11,339,672,392	(24.50)
Belanja Uang Makan PNS	378,279,000	427,861,000	(11.59)
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	206,600,000	270,050,000	(23.50)
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	670,100,000	658,050,000	1.83
Jumlah Belanja Kotor	9,816,536,234	12,695,633,392	(22.68)
Pengembalian Belanja Pegawai	(127)	(185,022)	(99.93)
Jumlah Belanja	9,816,536,107	12,695,448,370	(22.68)

Belanja Barang
Rp2.191.213.716

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.191.213.716 dan Rp2.691.989.442.

Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi belanja barang TA 2023 turun sebesar 18.60% dari realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini diantaranya karena realisasi belanja barang non operasional yang turun signifikan karena anggaran belanja bahan untuk bimtek dan belanja ekstrakomptabel peralatan dan mesin yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya sehingga berpengaruh pada realisasinya. Selain itu belanja jasa atas belanja langganan listrik pada tahun

2023, dibebankan pada anggaran belanja jasa Eselon 1 (Badan Urusan Administrasi).

*Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	782,823,125	779,120,832	0.48
Belanja Barang Non Operasional	9,886,000	36,908,050	(73.21)
Belanja Barang Persediaan	91,727,890	79,150,602	15.89
Belanja Jasa	493,962,849	810,147,280	(39.03)
Belanja Pemeliharaan	474,294,219	599,304,028	(20.86)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	338,519,633	387,358,650	(12.61)
Jumlah Belanja Kotor	2,191,213,716	2,691,989,442	(18.60)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	2,191,213,716	2,691,989,442	(18.60)

Belanja Modal
Rp109.958.990

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp109.958.990 dan Rp344.278.750. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2023 turun sebesar 68,06% dibandingkan pada TA 2022 yang disebabkan oleh anggaran belanja modal pada tahun 2023 lebih kecil dari tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi realisasi belanjanya.

*Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2023	REALISASI PER 31 DESEMBER TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109,958,990	344,278,750	-68.06%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00%
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00%
Jumlah Belanja Kotor	109,958,990	344,278,750	-68.06%
Pengembalian Belanja	0	0	0.00%
Jumlah Belanja	109,958,990	344,278,750	(68.06)

Realisasi belanja modal ini berupa belanja modal peralatan dan mesin yang berupa pengadaan fasilitas perkantoran seperti meja dan kursi kerja, sofa tamu, dan paket *speaker ceiling*.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp26.676.032

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Pengadilan Tinggi Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp26.676.032 dan Rp86.067.267.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak pelaporan.

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0

C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Jumlah	-	-

Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp9.473.850

C.1.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp9.473.850 dan Rp10.887.777. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima sepenuhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja Dibayar Dimuka TA 2023 dan 2022

Jenis	2023	2022
Sewa Web Hosting	9,473,850	10,887,777
Jumlah	9,473,850	10,887,777

Persediaan
Rp17.202.182

C.1.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp17.202.182 dan Rp75.179.490.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

Persediaan	2023	2022
Barang Konsumsi	12,280,882	50,449,100
Bahan untuk Pemeliharaan	4,921,300	24,730,390
Jumlah	17,202,182	75,179,490

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik dengan nomor : 2252.a/SEK.PT.W20/KKA/XII/2023.

Aset Tetap
Rp21.158.209.814

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Pengadilan Tinggi Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp21.158.209.814 dan Rp21.479.221.071. Aset Tetap merupakan Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Pengadilan Tinggi Gorontalo berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp7.602.649.000

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Tinggi Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah Rp7.602.649.000 dan Rp7.602.649.000.

Tabel Rincian Mutasi Tanah TA 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	7,602,649,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Selisih Revaluasi Aset	0
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2023	7,602,649,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	7,602,649,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Tanah TA 2023

NO	KIB	LUAS (m ²)	NO. SERTIFIKAT	ATAS NAMA	PERUNTUKAN	JUMLAH
1	2	5,693	31.01.03.05.2.00037	PT. GORONTALO	Gedung Kantor PT. Gorontalo	5,845,918,000
2	4	10,750	30.01.08.04.4.00027	PEMPROV GORONTALO	Gedung Kantor PT. Gorontalo (nonaktif)	550,730,000
3	1	780	31.01.05.08.2.00010	PT. GORONTALO	Rumah Dinas KPT, WKPT, Panitera, Sekretaris, dan Hakim Tinggi	302,865,000
4	1	2,370	31.01.05.08.2.00036	PT. GORONTALO		903,136,000
J U M L A H						7,602,649,000

Tanah seluas 10.750 M² saat ini sedang diupayakan untuk pengurusan hibah untuk dapat dilakukan perubahan nama dalam Sertifikat Hak Pakai.

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp5.285.284.031 dan Rp5.155.475.041.

Rincian mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	5,155,475,041
Mutasi tambah:	
Pembelian	109,958,990
Transfer Masuk	19,850,000
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	0
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Saldo per 31 Desember 2023	5,285,284,031
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	4,641,647,430
Nilai Buku per 31 Desember 2023	643,636,601

Peralatan dan
Mesin
Rp5.285.284.031

Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Mutasi Tambah :

- a. Pembelian sebesar Rp109.958.990 berupa:
 - 1. Alat Kantor & Rumah Tangga sebesar Rp109.958.990;
- b. Transfer Masuk sebesar Rp19.850.000 berupa:
 - 1. Komputer sebesar Rp19.850.000;

Mutasi Kurang :

Tidak terdapat Mutasi Kurang pada Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin selama Tahun Anggaran 2023.

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp15.399.408.200

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp15.399.408.200 dan Rp14.992.950.200.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	14,922,950,200
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	374,989,000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	476,458,000
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	374,989,000
Saldo per 31 Desember 2023	15,399,408,200
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(2,500,195,892)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	12,899,212,308

Rincian aset tetap gedung dan bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Mutasi Tambah :

- a. Reklasifikasi Masuk berupa Rumah Negara Golongan II Type C sebesar Rp374.989.000.
- b. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp 476.458.000

Mutasi Kurang :

- a. Reklasifikasi Masuk berupa Rumah Negara Golongan I Type C sebesar Rp374.989.000.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp476.458.000. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	476,458,000
Mutasi tambah:	
Revaluasi aset	0
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	476,458,000
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Mutasi Kurang :

- a. Koreksi Pencatatan berupa Jalan Khusus Kompleks, Saluran Drainage, Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang dan Jaringan Listrik Lainnya sebesar Rp476.458.000 yang berada dalam satu area dengan Kantor PT Gorontalo sehingga nilainya akan diakui menambah nilai Bangunan Gedung Kantor Permanen PT Gorontalo.

Rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp28.199.905

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp28.199.905 dan Rp28.199.905. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian dan buku perpustakaan (monografi).

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Buku Perpustakaan	12,711,905	12,711,905
Alat Musik Modern (Keyboard)	15,488,000	15,488,000
Jumlah	28,199,905	28,199,905

Tabel Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	28,199,905
Mutasi tambah:	
Transfer masuk monografi	0
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2023	28,199,905
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-15,488,000
Nilai Buku per 31 Desember 2023	12,711,905

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp7.157.331.322

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp7.157.331.322 dan Rp6.706.511.075.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	7,602,649,000	0	7,602,649,000
2	Peralatan dan Mesin	5,285,284,031	4,641,647,430	643,636,601
3	Gedung dan Bangunan	15,399,408,200	2,500,195,892	12,899,212,308
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	28,199,905	15,488,000	12,711,905
	Akumulasi Penyusutan	28,315,541,136	7,157,331,322	21,158,209,814

Buku Perpustakaan yang merupakan aset tetap lainnya tidak mengalami penyusutan.

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1

Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya Rp0

C.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Pengadilan Tinggi Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.224.750.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Pengadilan Tinggi Gorontalo terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp29.985.000

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp29.985.000 dan Rp29.985.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud TA 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	29,985,000
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2023	29,985,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(29,985,000)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2023

Uraian	Nilai
Software	29.985.000
Jumlah	29.985.000

Aset Lain-Lain Rp0

C.3.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp508.234.560. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional

entitas.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Mutasi Aset Lain-Lain TA 2023

Saldo per 31 Desember 2022	508,234,560
Mutasi tambah:	
Reklas dari Aset Tetap	0
Mutasi kurang:	
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	508,234,560
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Mutasi Kurang :

Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan sebesar Rp508.234.560 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, Alat Laboratorium, dan Komputer unit yang kita telah ditindaklanjuti dengan penginputan transaksi penghapusan sesuai dengan SK Penghapusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 533/SEK/SK/VI/2023.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
Rp29.985.000

C.3.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo akumulasi penyusutan/amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp29.985.000 dan Rp535.994.810. Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya merupakan kontra akun dari Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan Akumulasi Amortisasi Tak Berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud (Software)	29,985,000	29,985,000	0
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0
Jumlah	29,985,000	29,985,000	0

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp25.369.867

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp25.369.867 dan Rp2.679.180.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp25.369.867

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp25.369.867 dan Rp2.679.180. Utang pada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp 23,312,969	Rp -
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp 2,056,898	Rp 2,679,180
Total		Rp 25,369,867	Rp 2,679,180

Belanja Pegawai yang masih harus dibayar terdiri dari gaji dan uang makan 2 (dua) orang PPPK bulan Desember 2023, kekurangan gaji 2 (dua) orang pegawai bulan Desember 2023, dan uang makan 1 (satu) orang pegawai bulan Desember 2023 yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan.

Belanja Barang yang masih harus dibayar merupakan pemakaian langganan daya (air, telepon) bulan Desember 2023 yang belum dibayar hingga tanggal pelaporan.

Ekuitas
Rp21.159.515.979

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.159.515.979 dan Rp21.564.833.908.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp22.204.075

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan dari kegiatan operasional yakni PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.204.075 dan Rp23.016.754. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	22,204,075	23,016,754	(3.66)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
JUMLAH	22,204,075	23,016,754	(3.66)

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari pemanfaatan BMN yaitu berupa sewa rumah negara dan sewa sebagian tanah kantor PT Gorontalo untuk kantin.

Beban Pegawai
Rp9.839.849.076

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan per 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.839.849.076 dan Rp12.695.448.370. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji PNS & PPPK	2,668,168,840	3,030,850,660	(13.59)
Beban Pembulatan Gaji PNS & PPPK	32,285	36,578	(13.30)
Beban Tunjangan-Tunjangan PNS & PPPK	5,913,256,951	8,308,785,154	(40.51)
Beban Uang Makan PNS & PPPK	380,341,000	427,861,000	(12.49)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	207,950,000	270,050,000	(29.86)
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	670,100,000	658,050,000	1.80
Jumlah Beban Pegawai Kotor	9,839,849,076	12,695,633,392	(29.02)
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Beban Pegawai Netto	9,839,849,076	12,695,633,392	(29.02)

Beban Persediaan
Rp114.769.502

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp114.769.502 dan Rp49.938.472. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	114,769,502	49,938,472	56.49
Jumlah Beban Persediaan	114,769,502	49,938,472	56.49

Beban Barang dan Jasa
Rp1.287.463.619

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.287.463.619 dan Rp1.700.743.051. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	656,107,125	649,453,924	1.01
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,592,000	16,697,450	-22.85
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	113,124,000	65,930,000	41.72
Beban Barang Operasional Lainnya	0	48,309,958	#DIV/0!
Beban Barang Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0.00
Beban Barang Non Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	
Beban Bahan	2,334,000	13,071,000	-460.03
Beban Langganan Daya dan Jasa	29,315,767	199,801,410	-581.55
Beban Sewa	454,823,727	625,184,259	-37.46
Beban Jasa Profesi	5,715,000	52,200,000	-813.39
Beban Jasa Lainnya	4,900,000	5,900,000	-20.41
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	0	358,000	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	7,552,000	23,837,050	
Jumlah	1,287,463,619	1,700,743,051	-32.10
Pengembalian beban langganan listrik	0	0	0.00
Jumlah	1,287,463,619	1,700,743,051	-32.10

Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban-beban operasional perkantoran. Pembayaran pemakain listrik pada satuan kerja, dilakukan secara terpusat di Eselon 1 (Badan Urusan Administrasi) sehingga terjadi penurunan signifikan pada Beban Langganan Daya dan Jasa. Penyelenggaraan Bimtek ASN tahun 2023 dengan narasumber dari pusat dan juga jumlah peserta yang berkurang yaitu dikhususkan bagi eselon IV ke atas pada Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga mengurangi beberapa pos belanja seperti Beban Bahan dan Beban Jasa Profesi.

Beban
Pemeliharaan
Rp509.229.915

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp509.229.915 dan Rp612.740.938. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan Tahun 2023 mengalami penurunan 20,33 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh penurunan anggaran belanja pemeliharaan terutama belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	194,453,195	328,031,418	-68.69
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	55,843,522	47,976,636	14.09
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	223,997,502	223,295,974	0.31
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	34,935,696	13,436,910	61.54
Jumlah	509,229,915	612,740,938	-20.33

Beban Perjalanan
Dinas
Rp338.519.633

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp338.519.633. dan Rp387.358.650. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas dikarenakan berkurangnya frekuensi rapat koordinasi secara luring (*offline*)

dengan kantor pusat yang kini sebagian beralih menjadi rapat koordinasi secara daring (*online*). Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	291,678,673	365,308,650	-25.24
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,600,000	22,050,000	-129.69
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37,240,960	0	0.00
Jumlah	338,519,633	387,358,650	-14.43
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah	338,519,633	387,358,650	-14.43

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp606.608.290

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah Rp606.608.290 dan Rp642.705.805. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan TA 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	271,189,460	286,136,440	-5.51
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	335,418,830	326,483,348	2.66
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	29,240,850	#DIV/0!
Beban Amortisasi Software	-	-	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam operasional Pemerintah	-	845,167	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	606,608,290	642,705,805	-5.95

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp2.450.250

D.8 Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	2,450,250		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	4,675,000	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2,224,750	0	0.00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	0.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	2,450,250	0	0.00

Pos Luar Biasa Rp0

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada diluar kendali entitas. Rincian pos Luar Biasa untuk tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing adalah Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp21.564.833.908*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.564.833.908 dan Rp21.814.641.382.

*Defisit LO
Rp12.671.785.710*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.671.785.710 dan Rp16.065.918.532. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan/Kesalahan
Mendasar*

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Penyesuaian Nilai Aset Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0*

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Merupakan koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar BMN dari aplikasi persediaan.

Untuk periode hingga 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap mencerminkan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi

Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp158.269.293

E.3.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lain yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp158.269.293 dan Rp0. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi ini diperoleh karena adanya koreksi pencatatan atas BMN berupa Jalan dan Jembatan, Irigasi, serta Jaringan dan Koreksi Perubahan Nilai Bertambah pada BMN berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen yang menyebabkan terjadinya perbedaan pada pengakuan Akumulasi Penyusutannya.

Koreksi Lain-Lain
Rp0

E.3.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas
Rp12.108.198.488

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.108.198.488 dan Rp15.816.111.058. Transaksi Antar Entitas adalah Transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima Dari Entitas Lain	26,879,075
Ditagihkan ke Entitas Lain	12,117,708,813
Transfer Masuk	17,368,750
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	12,108,198,488

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp26.879.075 sedangkan DKEL sebesar Rp12.117.708.813.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berupa Aset Tetap Lainnya dan Peralatan Mesin dengan total sebesar Rp17.368.750 sebagai berikut:

Rincian Transfer Masuk TA 2023

Satker Pengirim (TK)	Satker Penerima (TM)	Uraian	Nilai
Badan Urusan Administrasi	Pengadilan Tinggi Gorontalo	Alat Pengolah Data	17,368,750
Jumlah			17,368,750

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan hibah langsung sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

*kuitas Akhir
Rp21.159.515.979*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.159.515.979 dan Rp21.564.833.908.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Sejak awal tahun anggaran 2012 pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

F.2.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Sampai dengan periode 31 Desember Tahun Anggaran 2023 terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akruwal untuk Pengadilan Tinggi Gorontalo Kode Anggaran 005.01. Data dapat dilihat pada lampiran.

F.2.3 REKENING PEMERINTAH

Rekening Bendahara Pengeluaran

Rekening yang dimiliki Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah *Virtual Account* atas nama BPG 050 Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo pada Bank BRI Cabang Gorontalo, Nomor rekening : 653246645391000. Data dapat dilihat pada lampiran.

F.2.4 REVISI DIPA

Sampai dengan 31 Desember 2023 Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan revisi terhadap DIPA sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke-01 tanggal 28 Desember 2022, berupa *automatic adjustment* anggaran T.A 2023;
2. Revisi DIPA ke-02 tanggal 16 Februari 2023, berupa pemutakhiran data POK belanja operasional (akun belanja honor operasional satker dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin) dan penyesuaian RPD pada Halaman III DIPA;
3. Revisi DIPA ke-03 tanggal 17 April 2023, berupa pemutakhiran data POK dan penyesuaian RPD pada halaman III DIPA;
4. Revisi DIPA ke-04 tanggal 14 Juli 2023, berupa pemutakhiran data POK belanja operasional pada akun belanja keperluan kantor, belanja barang operasional lainnya, belanja barang persediaan barang konsumsi serta belanja perjalanan dinas biasa, dan belanja perjalanan dinas dalam kota serta penyesuaian RPD pada halaman III DIPA;

5. Revisi DIPA ke-05 tanggal 01 September 2023, berupa *automatic adjustment* anggaran belanja non operasional bimbingan teknis ASN pada akun belanja bahan, belanja jasa profesi, dan belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota serta penyesuaian RPD pada halaman III DIPA;
6. Revisi DIPA ke-06 tanggal 07 September 2023, berupa pemutakhiran POK akun belanja keperluan kantor, belanja barang persediaan barang konsumsi, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, dan belanja pemeliharaan peralatan dan serta penyesuaian RPD pada halaman III DIPA;
7. Revisi DIPA ke-07 tanggal 23 Oktober 2023, berupa pergeseran antar KRO dan/atau antar kegiatan dan penambahan belanja modal (pengadaan *Speaker Ceiling*);
8. Revisi DIPA ke-08 tanggal 26 Oktober 2023, berupa Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir);
9. Revisi DIPA ke-09 tanggal 28 November 2023, berupa revisi antar satker dalam rangka penyelesaian pagu minus belanja pegawai, pemutakhiran POK dan revisi Halaman III DIPA;
10. Revisi DIPA ke-10 tanggal 01 Desember 2023, berupa penambahan belanja modal (pengadaan *meubelair*);
11. Revisi DIPA ke-11 tanggal 20 Desember 2023, berupa pemutakhiran POK.

F.2.5 RALAT SPM, SSBP, DAN SSPB

F.2.5.1 RALAT SPM

Sampai dengan akhir periode 31 Desember 2023 Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mengajukan revisi SSBP dengan nomor W20.U.1972/KU.01/10/2023 Tanggal 18 Oktober 2023, dimana perbaikan dilakukan atas akun transaksi penerimaan negara atas hasil penjualan BMN berupa inventaris kantor yang sebelum dibukukan pada akun 425129 (Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya) diubah menjadi akun 425122 (Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin). Permohonan revisi tersebut telah mendapat persetujuan perbaikan oleh KPPN Gorontalo yang tertuang dalam surat Kepala KPPN Gorontalo nomor S-1740/KPN.2901/2023 tanggal 24 Oktober 2023.

F.2.5.2 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)

Sampai dengan akhir periode 31 Desember 2023 pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak ada pengembalian belanja.

F.2.6 CATATAN PENTING LAINNYA

Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI No 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 telah ditunjuk Sdr. Benny A.Y Walukow, S.E – Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Serta Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/2221/KU.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/2220/KU.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/2222/KU.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan Pengadilan Tinggi Gorontalo, terdapat penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Pejabat Pembuat Komitmen	: Herdi Pakaya, S.H
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Deddy S. Botutihe, S.Kom
Bendahara Pengeluaran	: Novawati Monoarfa, A.Md
Bendahara Penerima	: Ivan Ombuh, S.E
PPABP	: Jafar Potale

Menjadi:

Pejabat Pembuat Komitmen	: Herdi Pakaya, S.H
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Nurmiraningsi Otoluwa, S.E
Bendahara Pengeluaran	: Meyke Rahim, A.Md
Bendahara Penerima	: Novawati Monoarfa, A.Md
PPABP	: Jafar Potale

Lampiran A1

Pengadilan Tinggi Gorontalo
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Total Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31 Des' 2022	Per 31 Des' 2023	Per 31 Des' 2023	Per 31 Des' 2023
A	Tanah						
1	Tanah	-	7,602,649,000	-	-	-	7,602,649,000
	Jumlah		7,602,649,000	-	-	-	7,602,649,000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan	7	1,087,793,556	1,087,793,556	-	1,087,793,556	-
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7	1,704,500	1,704,500	-	1,704,500	-
3	Alat Pertanian	5	28,280,000	28,280,000	-	28,280,000	-
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4	2,342,603,610	1,950,067,700	95,567,207	2,045,634,907	296,968,703
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5	575,558,590	303,910,275	71,069,918	374,980,193	200,578,397
6	Kursi Dorong	4	1,348,000	674,000	269,600	943,600	404,400
7	Alat Laboratorium	5	51,080,000	13,464,417	5,724,084	19,188,501	31,891,499
8	Komputer	5	1,196,915,775	982,082,272	101,039,901	1,083,122,173	113,793,602
	Jumlah		5,285,284,031	4,367,976,720	273,670,710	4,641,647,430	643,636,601
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung	50	14,514,776,200	1,969,561,742	374,727,706	2,344,289,448	12,170,486,752
2	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	884,632,000	134,257,214	21,649,230	155,906,444	728,725,556
	Jumlah		15,399,408,200	2,103,818,956	396,376,936	2,500,195,892	12,899,212,308
D	Jalan dan Jembatan						
1	Jalan Khusus Kompleks	40	-	114,261,503	(114,261,503)	-	-
	Jumlah		-	114,261,503	(114,261,503)	-	-
E	Irigasi						
1	Bangunan Air	40	-	42,868,771	(42,868,771)	-	-
	Jumlah		-	42,868,771	(42,868,771)	-	-
F	Jaringan						
1	Instalasi Gardu Listrik Induk	40	-	29,998,500	(29,998,500)	-	-
2	Jaringan Listrik Lainnya	40	-	32,098,625	(32,098,625)	-	-
	Jumlah		-	62,097,125	(62,097,125)	-	-
G	Aset Tetap Lainnya						
1	Alat Musik Modern/Band	40	15,488,000	15,488,000	-	15,488,000	-
2	Buku Perpustakaan		12,711,905	-	-	-	12,711,905
	Jumlah		28,199,905	15,488,000	-	15,488,000	12,711,905
H	Software						
1	Aset Tak Berwujud	4	29,985,000	29,985,000	-	29,985,000	-
	Jumlah		29,985,000	29,985,000	-	29,985,000	-
I	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan						
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga		-	217,841,575	(217,841,575)	-	-
2	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		-	3,685,000	(3,685,000)	-	-
3	Alat Laboratorium		-	10,452,750	(10,452,750)	-	-
4	Komputer		-	274,030,485	(274,030,485)	-	-
	Jumlah		-	506,009,810	(506,009,810)	-	-
	Total		28,345,526,136	7,242,505,885	(55,189,563)	7,187,316,322	21,158,209,814

*Tanah dan buku tidak mengalami penyusutan